

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

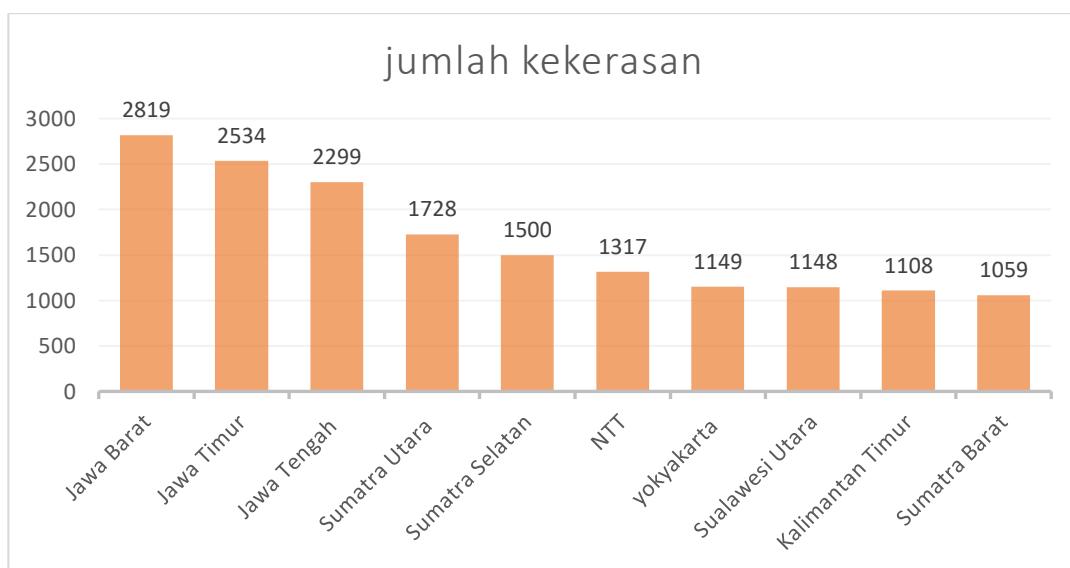
Wanita di Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan, pekerjaan, terjadinya kekerasan, dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan (Women, 2020). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat posisi perempuan di sektor publik maupun swasta. Upaya peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan telah menghasilkan dampak positif, khususnya dalam mendukung perempuan memasuki dunia kerja dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga dan nasional (Perlindungan Anak, 2023). Pemberdayaan perempuan di Indonesia merupakan langkah krusial mengingat peran perempuan mengalami pergeseran dari posisi tradisional menuju modern. Dahulu, perempuan sering diidentikkan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi kini banyak yang menjadi "independent women" dengan peran yang lebih aktif di dunia kerja dan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), partisipasi wanita dalam angkatan kerja di Indonesia mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2023, partisipasi angkatan kerja wanita mencapai 54,52% (Saputra, 2024). Kenaikan ini menunjukkan peran wanita yang semakin signifikan sebagai pendorong ekonomi di berbagai sektor. Peningkatan ini sejalan dengan perubahan dalam dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia. Wanita yang aktif dalam karier mereka dapat memengaruhi struktur keluarga dan ekonomi, sehingga mendorong adopsi model pendapatan ganda atau *dual-income* dalam satu keluarga (UN Women, 2023). Model *dual-income* ini, telah menjadi hal yang biasa terutama di kota-kota besar.

Namun demikian wanita seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti adanya norma patriarki yang terkadang menghalangi wanita untuk berkembang. dalam hal ini khususnya dalam konteks asia atau di indonesia, sering kali wanita dituntut untuk menjadi seorang ibu yang dirumah saja. dengan adanya kasus

perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi yang mengharuskan wanita untuk berjuang “*survive*”. Selain itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, meningkatnya kasus tersebut salah satunya adalah faktor ekonomi dan tekanan sosial dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebut, jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2023, tercatat naik tiga kali lipat dari tahun 2022. Banyaknya laporan yang ada, dapat ditemukan Kota kota besar yang memiliki prevalensi kekerasan, sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Data Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan



sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2023

Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke-2 setelah Jawa Barat dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, mencatat kasus terbanyak di provinsi ini. Surabaya, dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, menghadapi berbagai faktor risiko yang memicu tingginya angka kekerasan, seperti kepadatan penduduk, stres ekonomi, ketimpangan sosial, dan tekanan sosial. Pada tahun 2023, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat 334 korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak dari 166 kasus yang dilaporkan, berdasarkan pengaduan langsung maupun hasil monitoring media online. Dari data tersebut, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu penyumbang terbesar. pada 2023, kasus kekerasan perempuan mencapai 126 laporan. Kasus KDRT terbanyak 63 laporan meliputi kategori fisik 28 laporan, penelantaran ekonomi 13 laporan, psikis 21 laporan, dan seksual 1 laporan. Sedangkan untuk kasus kekerasan kategori non-KDRT pada periode yang sama ada 19 laporan terdiri dari 9 kekerasan fisik, 1 penelantaran ekonomi, 3 kekerasan psikis dan 6 kekerasan seksual (Widiyana, 2024). Untuk menangani permasalahan ini, DP3A-PPKB Surabaya telah menyiapkan shelter khusus, meskipun fasilitas ini masih terbatas dan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menghadapi kebutuhan yang terus meningkat.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Surabaya dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang kompleks. Sehingga dapat dipicu oleh beberapa hal seperti, Norma patriarki yang dominan sering membuat perempuan berada di posisi yang lebih rendah atau tidak setara. Patriarki mempertahankan budaya yang mentolerir atau bahkan mendorong kekerasan terhadap perempuan dengan mempertahankan dominasi laki-laki dan penaklukan perempuan (hikmatul azizah, 2024). Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sekitar 70% dari kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam lingkungan domestik. Pelaku utama dalam kasus -kasus ini sering kali adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan korban, seperti pasangan suami-istri, mantan pasangan, atau anggota keluarga. Sehingga perlu adanya parenting dan edukasi dalam menangani masalah relationship di masyarakat.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi karena faktor ekonomi. faktor ekonomi memainkan peran penting, banyak perempuan yang terjebak dalam situasi kekerasan karena ketergantungan finansial terhadap pasangan atau keluarga. Tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering menjadi pemicu konflik rumah tangga,

yang kemudian berujung pada kekerasan, Kemiskinan, pengangguran, serta tingginya biaya hidup di kota besar seperti Surabaya juga turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, perlunya pemberdayaan terhadap perempuan yang dapat membantu faktor perekonomian keluarga.

Menghadapi masalah ini, perlu penanganan efektif yang bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor terkait. Untuk itu, perlunya dibutuhkan sistem dukungan yang komprehensif bagi korban, seperti shelter, layanan konseling, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A-PPKB) Surabaya memang telah berupaya menyediakan shelter, namun fasilitas tersebut masih terbatas dan harus terus diperkuat. Kebutuhan akan pusat yang lebih holistik, yang tidak hanya menyediakan tempat perlindungan, tetapi juga edukasi preventif tentang kekerasan dan hak-hak perempuan, menjadi sangat mendesak guna menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemberdayaan perempuan dapat lebih efektif ketika didukung oleh lingkungan yang collaborative, di mana berbagai pihak bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Lingkungan seperti ini memungkinkan perempuan untuk saling berbagi pengalaman, memperoleh pengetahuan, dan membangun keterampilan secara bersama-sama (Kabeer, 1999). Dalam lingkungan yang collaborative, perempuan tidak hanya mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan dan konseling, tetapi juga kesempatan untuk berkolaborasi dengan individu atau kelompok lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Fasilitas yang memungkinkan perempuan untuk terlibat dalam diskusi kelompok, pelatihan, dan berbagai kegiatan yang memperkuat kemandirian mereka sangat penting. Ruang ini juga menciptakan ruang yang penuh dukungan, di mana perempuan dapat saling memberi motivasi, menginspirasi, dan belajar dari satu sama lain, sehingga mempercepat proses pemberdayaan (World, 2012).

Lingkungan yang kolaboratif sangat penting dalam menciptakan koneksi antara perempuan dengan berbagai sumber daya eksternal, termasuk pengusaha, organisasi, dan lembaga pemerintah yang dapat menyediakan peluang ekonomi dan dukungan hukum. Selain meningkatkan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerja tim, dan negosiasi yang krusial dalam peran mereka di masyarakat dan dunia kerja, kolaborasi juga menciptakan sinergi antara berbagai pihak sehingga pemberdayaan perempuan menjadi usaha bersama dengan dampak lebih besar dan berkelanjutan. Srikandi Collaborative Space hadir sebagai fasilitas yang tidak hanya menyediakan layanan perlindungan, konseling, dan pelatihan keterampilan, tetapi juga membangun koneksi dan mendukung pemulihian psikologis serta sosial korban. Ruang ini berfungsi sebagai inspirasi dan simbol dukungan, menciptakan ekosistem yang memotivasi perempuan untuk berani mengembangkan potensi diri mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sarana dirancangnya bangunan *Srikandi Collaborative Space: Supportive Women's Empowerment* Surabaya adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- Membangun peluang dan koneksi sosial yang memungkinkan perempuan mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dalam lingkungan yang lebih baik.
- Memberikan wadah untuk komunitas wanita yang dapat membentuk dan meningkatkan potensi dirinya serta tempat mengedukasi perempuan untuk lebih sadar akan isu-isu penting yang berkaitan dengan hak-hak dan permasalahan perempuan.
- Memberikan dukungan dan lingkungan yang aman kepada korban kekerasan, dengan adanya layanan psikologis dan dukungan dari komunitas perempuan.

Sasaran :

- Wadah bagi komunitas wanita yang dapat berkontribusi terhadap proses pemberdayaan perempuan.
- Layanan shelter dan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan yang butuh penanganan khusus .
- Tempat pelayanan pengaduan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

1.3. Batasan Perancangan

Dalam memberi arah pembahasan maka poin-poin yang digunakan dalam batasan sebagai berikut :

- *Srikandi Collaborative Space: Supportive Women's Empowerment* Surabaya ini beroperasi dari jam 08.00-17.00 WIB untuk area edukasi, konseling, pelatian, sharing, keterampilan, dan 24 jam untuk beberapa area public yang disewakan, perawatan rawat inap dan layanan pengaduan.
- Bangunan ditujukan bagi Masyarakat, komunitas, dan perempuan korban kekerasan di kalangan remaja, dewasa.

Sedangkan asumsi dalam perancangan pusat *collaborative space women empowerment* dijabarkan sebagai berikut :

- Bangunan ini dimiliki oleh pihak Pemerintah di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Proyek ini direncanakan sebagai Pusat *collaborative space women empowerment* di jawa timur.

1.4. Tahapan Perancangan

Untuk merealisasikan gagasan *Srikandi Collaborative Space: Supportive Women's Empowerment* Surabaya, perancangan ini dilakukan melalui beberapa tahapan penting sebagai berikut:

- Interpretasi Judul

Pada tugas akhir ini, judul "SRIKANDI COLLABORATIVE SPACE: SUPPORTIVE WOMEN'S EMPOWERMENT " diartikan sebagai tempat membentuk wanita wanita kuat dengan fasilitas yang berfungsi untuk membantu pemulihan mental bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Selain itu, pusat ini juga sebagai tempat pengaduan kekerasan, tempat sebuah komunitas, serta tempat bagi korban kekerasan untuk mengembangkan diri dan memperoleh edukasi baru.

- Pengumpulan Data

Mengumpulkan data berbagai kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Indonesia, mengumpulkan informasi tentang fasilitas pendukung yang telah ada bagi korban perempuan dan kebutuhannya. Proses ini mencakup studi literatur yang berkaitan dengan arsitektur perilaku serta prinsip desain yang sesuai.

- Analisis Data

Menganalisis potensi dan penyebab suatu masalah berarti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya permasalahan. Proses ini bertujuan untuk menemukan hubungan sebab-akibat yang relevan. Setelah penyebab diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menemukan solusi dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.

- Azas dan Metode Perancangan

Perancangan disesuaikan dengan permasalahan dan topik yang diambil, lalu diadaptasi berdasarkan teori-teori yang relevan sebagai acuan atau batasan desain. Prinsip-prinsip desain dikaitkan dengan teori-teori terkait pemberdayaan dan perlindungan, yang menjadi pedoman dalam mengarahkan batasan desain serta fungsi ruang.

- Konsep Rancangan

Konsep dasar perancangan muncul dari landasan yang telah didapatkan dalam proses analisis. Hasil ini membentuk dasar desain dan menentukan tata letak ruang, fungsi, dan karakteristik visual bangunan. Pada tahap ini, aspek-aspek seperti zonasi ruang, sirkulasi, dan desain banguann menjadi bagian penting yang dipertimbangkan.

- Gagasan Ide Rancangan

Proses ini melibatkan pengembangan ide-ide awal yang dihasilkan dari berbagai pendekatan desain. Ide-ide tersebut disesuaikan dengan konsep dan tema yang telah ditentukan, menghasilkan rancangan yang sesuai dengan fungsi, estetika, dan keamanan yang dibutuhkan oleh bangunan tersebut.

- **Pengembangan Rancangan**

Pada tahap pengembangan ini, desain yang telah dikonsepkan diperdalam, memastikan bahwa setiap elemen bangunan, baik dari segi struktur maupun tata ruang, selaras dengan tujuan utama proyek. Desain juga mempertimbangkan aspek fungsionalitas dan kenyamanan bagi korban.

- **Gambar Rancangan**

Tahap terakhir adalah visualisasi berupa gambar kerja yang lengkap, meliputi siteplan, layout ruang, denah lantai, potongan bangunan, tampak luar, sistem utilitas, hingga perseptif tiga dimensi. Gambar kerja ini menjadi panduan utama dalam pelaksanaan Pembangunan.

1.5. Sistematika Laporan

Untuk mewujudkan ide tersebut menjadi rencana dan desain fisik yang efektif, penyusunannya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari pentingnya pembangunan *Srikandi Collaborative Space: Supportive Women's Empowerment*, dengan pendekatan Arsitektur Perilaku. Fakta lapangan, tujuan, sasaran, batasan, dan asumsi perancangan diuraikan secara rinci sebagai panduan awal proyek ini.

Bab II : Tinjauan Objek Perancangan

Bab ini mencakup tinjauan umum tentang Pusat *collaborative space women empowerment* serta literatur arsitektur perilaku yang mendukung kenyamanan dan penyembuhan. Selain itu, ada tinjauan khusus yang membahas perancangan, pengguna, aktivitas, dan kebutuhan ruang.

Bab III : Tinjauan Lokasi

Bab ini fokus pada dasar pemilihan lokasi perancangan di Surabaya. Kajian

Tapak lokasi meliputi potensi aksesibilitas, kondisi eksisting, dan ketersediaan infrastruktur yang relevan untuk proyek ini.

Bab IV : Analisa Perancangan

Dalam bab ini, dilakukan analisa menyeluruh terkait Perancangan, tapak, aksesibilitas, iklim, lingkungan sekitar, serta organisasi ruang dan sirkulasi. Analisis tersebut menjadi dasar untuk menentukan konsep desain yang akan diterapkan.

Bab V : Konsep Perancangan

Bab ini menjelaskan fakta dan isu yang diidentifikasi untuk menetapkan tema, pendekatan, metode, ide, serta konsep dalam meracang *Srikandi Collaborative Space: Supportive Women's Empowerment* Surabaya. Pemaparannya meliputi bentuk, struktur, tatanan massa, lanskap, interior, penghawaan dan pencahayaan.

Bab VI : Aplikasi Perancangan

Bab ini memaparkan hasil nyata dari penerapan konsep pada tapak terpilih. Pembahasan aplikasi ini meliputi seluruh aspek desain visual dalam bentuk 3D model dan gambar kerja yang sudah diterapkan dalam perancangan.